



RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 **Ringkasan Eksekutif** **(Executive Summary)**

I. Pendahuluan

Progam Pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan di Indonesia menjadi sangat rumit mengingat luasnya wilayah dan terus berkembangnya jumlah penduduk, yang menimbulkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam. Dalam prosesnya, pembangunan akan menimbulkan perubahan besar yang melibatkan perubahan fisik wilayah, perubahan sosial dan ekonomi, perubahan dalam pola konsumsi, sistem nilai, teknologi, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perubahan-perubahan tersebut muncul sebagai dampak dari berbagai aktivitas, seperti industri, pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan jasa, dan menimbulkan tekanan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia, seperti keanekaragaman hayati, air, udara, luasan hutan dan kawasan lindung, serta perubahan iklim dan cuaca.

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam guna menunjang pembangunan dapat dikembangkan secara maksimal mungkin dengan risiko yang minim namun harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia dengan mendepankan nilai-nilai Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang harus dipenuhi setiap negara untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau ekonomi hijau. Poin-poin utama dalam pembangunan berkelanjutan tersebut adalah memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk mendukung tindakan mitigasi bencana lingkungan,

adaptasi dan alih teknologi ramah lingkungan terkait perubahan iklim. Hasil pemantauan dan evaluasi SDGs di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pencapaian tujuan-tujuan SDGs ini masih banyak yang dinilai kurang, misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih terjangkau dan terbarukan, produksi pangan yang berkelanjutan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta konsumsi, kondisi ekosistem darat, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Keterbukaan terhadap akses informasi publik didukung oleh adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, Pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan pembangunan perlu didukung data dan informasi lingkungan hidup yang berkesinambungan, terukur, akurat dan transparan. Data dan informasi tersebut adalah merupakan bagian dari pelaksanaan unsur konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang mencerminkan keterkaitan hubungan sebab akibat dalam relasi antara lingkungan (ekosistem) dan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan uraian peraturan perundang-undangan di atas maka dari berbagai data dan informasi lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul sebagai bahan kajian dan memutuskan kebijakan dalam melanjutkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022 pada Pedoman Penyusunan Dokumen IKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2023. Dokumen

DIKPLHD Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini disusun sebagai langkah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul tentang penyediaan informasi lingkungan hidup dan mengevaluasi kondisi lingkungan yang menyangkut perencanaan pembangunan suatu daerah.

Tujuan dari penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan ilmiah mengenai lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul sebagai acuan pengambilan kebijakan, dan perencanaan pembangunan
2. Menyediakan sumber informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh berbagai pihak yang terkait demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat
3. Menyediakan sarana pemantauan kinerja pemerintah atas upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup bagi berbagai pihak di wilayah Kabupaten Bantul
5. Menyediakan informasi akurat bagi peringatan dini terhadap potensi permasalahan lingkungan hidup, yang dapat mendorong dilakukannya evaluasi dan langkah-langkah antisipasi.

II. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Aspek utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis, yaitu:

1. Faktor penggerak tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup (*driving force*) beberapa faktor penggerak antara lain faktor sosial kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.

2. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*) berupa aktivitas/ kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang akan menimbulkan tekanan lingkungan dan merubah keadaannya.
3. Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya (*state*), Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan prediksi situasi, kondisi dan pengembangannya di masa depan.
4. Setiap kegiatan atau aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akan berdampak (*impact*) terhadap lingkungan.
5. Respon (*response*) masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan reformasi ekonomi.

Dalam laporan ini, analisis D-P-S-I-R akan dilakukan untuk 3 isu lingkungan prioritas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas Air
3. Kualitas Udara
4. Resiko Bencana
5. Perkotaan
6. Tata Kelola

A. TATA GUNA LAHAN

Driving Force

- a. Jumlah tahun 2022 tercatat sebanyak 957.352 jiwa yang terbagi menjadi penduduk perempuan sebanyak 481.044 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 476.308 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 0,09 % dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebanyak 956.513 jiwa.

- b. Perubahan Kawasan industri memiliki ketidaksesuaian tertinggi sebesar 96,61% karena kawasan tersebut saat ini masih digunakan sebagai tegalan.
- c. Pertumbuhan ekonomi Menurut PDRB di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup drastis di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,85%. Hal ini selaras dengan jumlah timbulan sampah yang setiap tahun mengalami kenaikan.

Pressure

- a. Perubahan lahan tertinggi diperuntukan untuk kawasan permukiman mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 21.396,71 Ha atau berkisar 33,03%.
- b. Peningkatan aktivitas pembangunan untuk sarana permukiman, Perdagangan, jasa, dan industri tahun 2022 sebesar 33%.
- c. Daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung permukiman yang cukup untuk seluruh kapanewon masih belum terlampaui

State

- a. Penggunaan lahan yang paling luas adalah kawasan permukiman, dengan luas mencapai 21396.71 Ha, diikuti oleh sawah irigasi seluas 13.721.10 Ha, dan kebun campuran seluas 7130.31 Ha.
- b. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 64,34, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 9,13 poin
- c. Keberadaan TPAS Piyungan dengan kondisi yang telah mengalami kelebihan kapasitas penampungan (overcapacity)
- d. Keanekaragaman sumberdaya hutan di Kabupaten Bantul
- e. Pemanfaatan bukaan lahan yang belum optimal

Impact

- a. Menimbulkan Bencana pada Bangunan yang Berada di Kawasan Bencana
- b. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa di beberapa kecamatan
- c. Meningkatkan potensi lahan kritis
- d. Perubahan struktur pola ruang kawasan yang tidak sesuai peruntukannya
- e. Timbulan sampah di bahu jalan akibat penutupan TPAS Piyungan

Response

- a. Upaya penangan lahan kritis dilakukan dengan perbaikan kualitas tanah melalui penanaman penambahan luasan tutupan vegetasi di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air dan lahan kritis)
- b. Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul melalui konservasi hutan, mangrove, flora dan fauna endemik
- c. Pengurangan sampah melalui pendekatan teknologi daur ulang sampah
- d. Penetapan Regulasi Penataan Ruang dan Implementasinya
- e. Upaya penanganan ruang terbuka hijau

B. KUALITAS AIR

Driving Force

- a. Pertumbuhan permukiman dan penduduk akan meningkatkan aktifitas domestik yang berdampak pada peningkatan volume limbah yang dapat mencemari kualitas air.
- b. Kondisi hidrogeologi yang bervariasi
- c. Ketidaktaatan pengusaha dalam pengelolaan pemantauan lingkungan mencapai 83,3% atau 20 perusahaan tidak taat
- d. Keterbatasan sarana BAB yang layak dan tidak memiliki tangki septik dan resapan yang sesuai SNI

Pressure

- a. Aktifitas domestik, pertanian, dan peternakan yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan
- b. Pemanfaatan sumberdaya air yang berlebihan
- c. Pembuangan limbah domestik di sepanjang aliran sungai

State

- a. Tren kualitas air sungai di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari pada tahun-tahun sebelumnya dengan hanya mencapai 36,57, parameter seperti TDS, TSS, dan Total Coliform melebihi baku mutu
- b. Kualitas airtanah tanpa adanya kegiatan pengelolaan sampah memiliki nilai yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, terdapat satu parameter, yaitu TSS, yang melebihi baku mutu.
- c. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air laut, terdapat beberapa parameter yang masih melebihi baku mutu, antara lain TSS, sianida, dan lapisan minyak.
- d. Kualitas air tanah mengandung total coliform pada kawasan TPA Piyungan dan pemukiman dekat industri >1898 jmlh/1000 ml.

Impact

- a. Terjadinya penurunan kualitas air
- b. Hilangnya spesies flora dan fauna di ekosistem sungai dan pesisir
- c. Menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan beban pencemar sungai dan menyebabkan biota air tercemar.

Response

- a. Kewajiban Progam Membangun Sumur Peresapan Air Hujan
- b. Kegiatan Gropyok Sampah di Sungai
- c. Regulasi dan monitoring kualitas air secara berkala dan berkesinambungan

- d. Penerapan ijin lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terutama industri

C. KUALITAS UDARA

Driving Force

- a. Perkembangan Kabupaten Bantul mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor
- b. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate).
- c. Rata-rata curah hujan bulanan di Bantul adalah 133,32 mm pada 5 stasiun pengamatan, dan bulan paling tinggi curah hujan nya adalah bulan Januari, Maret, dan April dengan kondisi suhu udara relative konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata yakni berkisar 25,98 °C.

Pressure

- a. Meningkatnya arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat sebagai dampak dari adaptasi kebiasaan baru terhadap Covid-19 telah berkontribusi pada peningkatan parameter kualitas udara
- b. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul tahun 2022 mencapai 457.242 unit, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 345.357 unit pada tahun 2021.

State

- a. Indeks Kualitas Udara (IKU) ambien di Kabupaten Bantul Tahun 2022 berkontraksi mengalami kenaikan yakni menjadi 86,34 dari Tahun 2021 yang hanya mendapatkan nilai sebesar 83,28.
- b. Hasil pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Bantul masih relatif baik dengan 2 parameter yang diuji semuanya tidak ada yang melampaui baku mutu sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- c. Luas kelas jasa pengaturan kualitas udara di Kabupaten Bantul didominasi oleh Kelas tinggi dan rendah dengan masing-masing luas sebesar 16.714,65 ha dan 16.716,78 ha

Impact

- a. Gangguan kesehatan masyarakat terutama saluran pernapasan
- b. Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Mobilisasi Penduduk
- c. Pencemaran udara yang mengakibatkan semakin menipisnya lapisan ozon di bumi dapat memberikan dampak serius pada lingkungan

Response

- a. Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak pemantauan kualitas udara secara periodik.
- b. Optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pengukuran kualitas air hujan

D. RiSIKO BENCANA

Driving Force

- a. Kondisi geologi dan morfologi Kabupaten Bantul dimana Kabupaten Bantul dilalui Sesar Opak yang merupakan pemicu gempa bumi di darat.
- b. Kondisi morfologi perbukitan membuat sebagian daerah seperti di Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Piyungan berpotensi tanah longsor. Sedangkan untuk daerah pantai seperti Kapanewon Kretek berpotensi untuk terjadinya banjir rob
- c. Sejarah kejadian bencana

Pressure

- a. Risiko bencana di Kabupaten Bantul terdapat dua bencana dengan risiko tinggi yaitu banjir dan kebakaran hutan/lahan. Sedangkan risiko bencana sedang meliputi, gempa bumi, tsunami, gelombang esktrim dan abrasi, cuaca ekstim, dan kekeringan.

State

- a. Kejadian bencana selama tahun 2022 total kejadian sebanyak 976 kali.
- b. Kejadian bencana selama tahun 2021 dengan total kejadian sebanyak 130 kali, yaitu banjir sebanyak 8 kali pada empat kecamatan, tanah longsor 103 kali, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 8 titik lokasi dan gempa bumi sebanyak 11 kali.
- c. Seluruh kejadian tersebut dengan ketiga bencana terbesar yang paling banyak dialami yaitu, bencana angin kencang, bencana pohon tumbang dan bencana tanah longsor.
- d. Kelas jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana didominasi oleh kelas tinggi sebesar 15.312,65 ha

Impact

- a. Kerugian material akibat bencana alam
- b. Bencana alam juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satu penyakit dampak bencana banjir adalah leptospirosis

Response

- a. Kegiatan penanganan bencana berupa pembuatan SPAH untuk mencegah banjir, reboisasi di lahan kritis, dan pembinaan
- b. Progam penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul, yaitu Sekolah Siaga Bencana berjumlah 16 sekolah, Destana (Desa Tangguh Bencana) berjumlah 35 Desa, dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) berjumlah 14 personil.
- c. Sosialisasi mitigasi bencana alam dan non alam
- d. Pencegahan Bencana Longsor dan Angin Kencang

E. PERKOTAAN

Driving Force

- a. Perkembangan penduduk perkotaan menjadi semakin tinggi. Kondisi ini telah nampak di Kabupaten Bantul dimana penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon) lebih banyak dari pada penduduk yang tinggal di pedesaan. Ketiga Kecamatan tersebut mengisi 33,40%
- b. Pola persebaran jumlah penduduk cenderung tidak merata. Beberapa kecamatan yang dekat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
- c. Sikap dan perilaku masyarakat

Pressure

- a. Tata kelola sampah yang belum optimal
- b. TPAS Piyungan hanya memiliki luas 15 hektar dengan kapasitas maksimal 2.700.000 m³, namun saat ini, pada tahun 2022, telah mencapai 4.838.819,39 m³.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat yang dilihat dari adanya 5 aduan lingkungan berkaitan tentang keberadaan sampah liar dan membakar sampah.

State

- a. Kondisi jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Bantul adalah 957.352 jiwa, dengan asumsi produksi sampah per orang adalah 0,542 kg/hari, maka produksi sampah di Kabupaten Bantul adalah 518,885 Kg/Hari atau sekitar 0,518 ton perhari
- b. Penggunaan air ledeng/PDAM di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 7.601 rumah tangga dengan pemanfaatan tertinggi di Kapanewon Dlingo yang merupakan daerah sulit air bersih.

- c. Luas kelas jasa penyedia air bersih di Kabupaten Bantul didominasi oleh kelas sangat tinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 14.581,42 ha

Impact

- a. Produksi limbah perkotaan yang meningkat dengan instansi penghasil volume limbah cair terbesar yaitu Balai Pialam Dinas PUP & ESDM sebesar 787,270 m³/hari.
- b. Gangguan penyakit dan kesehatan masyarakat
- c. Pembuangan sampah di sungai

Response

- a. Optimalisasi dalam rangka pengurangan volume timbulan sampah di TPA Piyungan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain ditimbun, untuk dibuat kompos, dijual, dan dimanfaatkan ulang.
- b. Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
- c. Patroli lingkungan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah
- d. Penanganan Pengelolaan Limbah B3
- e. Pengefektifan bank sampah dan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat

F. TATA KELOLA

Driving Force

- a. Anggaran 2022 sebesar Rp38.104.834.366,00. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Pada akhirnya, realisasi belanja yang terjadi mencapai Rp36.036.712.344,00 atau setara dengan 94,57% dari total anggaran
- b. Sepanjang tahun 2022, terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul sebesar 5,20 persen, angka ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pressure

- a. Aduan lingkungan akibat kegiatan usaha yang meliputi 24 aduan dari masyarakat dengan rincian aduan pencemaran udara akibat industri, sampah, dan kandang babi sebanyak 16 aduan, persampahan sebanyak 5 aduan, dan kasus pencemaran air sebanyak 3 aduan

State

- a. Jumlah staff personil yang aktif sampai dengan saat ini sebanyak 97 personil, berdasarkan tingkat pendidikan adalah SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 44 orang, Diploma sebanyak 6 orang, Sarjana S1 sebanyak 26 orang, dan Master/S2 sebanyak 11 orang
- b. LSM lingkungan hidup juga banyak berdiri di Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 18 LSM, 12 di antaranya tercatat telah memiliki Akta Pendirian.
- c. Efisiensi belanja Dina Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebesar 5,43% dari total anggaran belanja yang telah dialokasikan.

Impact

- a. Tantangan dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup
- b. Pengawasan ketaatan izin lingkungan didapatkan bahwa presentase perusahaan yang taat sebesar 16,67% (4 perusahaan) dan tidak taat sebesar 83,3% (20 perusahaan).

Response

- a. Pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup
- b. Kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat
- c. Pemberian penghargaan pengelola lingkungan hidup
- d. Pelestarian kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup

III. PENENTUAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Langkah Persiapan yang meliputi *review literatur* yakni kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Selanjutnya dilakukan pembentukan tim penyusun dokumen dan tenaga ahli Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kab. Bantul yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Langkah pelaksanaan yang meliputi identifikasi dan pengumpulan data pendukung baik data Primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan sesuai dengan kebutuhan kajian. Tahap selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi awal dengan tim penyusun DIKPLHD.

Langkah penyusunan yang meliputi kompilasi data, analisis data, dan penyajian dokumen DIKPLHD. Kompilasi data dilakukan terhadap seluruh data, baik data sekunder maupun data primer. Pemilahan data berdasarkan isu-isu yang dirangkum dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan, menghasilkan ketetapan isu lingkungan prioritas yang akan menjadi landasan utama dalam pembahasan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Sampah Belum Optimal
2. Penurunan kualitas air
3. Dinamika alih fungsi lahan

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL

Upaya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bantul meliputi kegiatan atau program sebagai berikut:

1. Regulasi Penertiban dan Pengawasan Tata Ruang
2. Sinergitas Regulasi dengan Fasilitas Penunjang Persampahan

3. Leontin Mas' dan M-KIA
4. Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) dan Dikal
5. Progam Penyusunan Rencana Induk Persampahan
6. Progam Perencanaan KDN TPST Regional PiyunganSinergitas
Progam Kampung Iklim (PROKLIM)
7. Pengembangan Progam Kampung Iklim (PROKLIM)
8. Inovasi Produk Hukum Dalam Bidang Lingkungan
9. Pelestarian Kearifan Lokal Labuhan dan Merti Dusun
10. Optimalisasi Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
11. Penghijauan Dalam Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis
12. Progam Konservasi Sumber Daya Air
13. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
14. Progam Kegiatan Gropyok Sampah
15. Peningkatan Fasilitas Sampah dan Kampanye Lingkungan

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan lingkungan yang terdapat di Kabupaten Bantul sudah cukup baik terlepas dari alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan permukiman mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 21.396,71 Ha atau berkisar 33,03%.
2. Tren kualitas air sungai di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari pada tahun-tahun sebelumnya dengan hanya mencapai 36,57.
3. Konsentrasi N02 dan SO2 di udara ambien Kabupaten Bantul terus menunjukkan penurunan sehingga Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2022 berkontraksi mengalami kenaikan yakni menjadi 86,34.
4. Kejadian bencana selama tahun 2022 total kejadian sebanyak 976 kali. Dari seluruh kejadian tersebut dengan ketiga bencana

terbesar yang paling banyak dialami yaitu, bencana angin kencang, bencana pohon tumbang dan bencana tanah longsor.

5. Tempat Penyimpanan Akhir (TPA) Piyungan yang semestinya. Meskipun TPAS Piyungan hanya memiliki luas 15 hektar dengan kapasitas maksimal 2.700.000 m³, namun saat ini, pada tahun 2022, telah mencapai 4.838.819,39 m³..
6. Komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bantul menurut KLHK (2022) mencapai 60,54% berasal dari rumah tangga adalah yang meliputi, sampah sisa makanan, jenis sampah terbesar kedua yaitu sampah plastik yang mencapai 24,33%.
7. Upaya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 24 usaha atau pemrakarsa di Kabupaten Bantul Tahun 2022 didapatkan hasil perusahaan/pemrakarsa yang taat sebesar 16,67% atau 4 perusahaan, dan yang tidak taat sebesar 83,3% dengan jumlah 20 perusahaan.
8. Sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan dan menerbitkan 18 produk hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan.